



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF
UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI DAN INFRASTRUKTUR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ONENG SETYA HARINI**
2. Jabatan : **SEKRETARIS DEPUTI**
3. NHK : **102392**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.590.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 110 m2/270 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/21 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/90 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 22 m2/106 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 226.000.000

1. MOTOR, N MAX SEPEDA MOTOR Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000
2. MOBIL, SWIFT MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. MOTOR, MIO SOUL SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
4. MOBIL, AVANZA MINI BUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 56.300.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. 170.900.000**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 142.000.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----



Sub Total	Rp.	2.185.200.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.185.200.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.